

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 11 / 1401

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 150 /A/J.A/ 07/2011

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN
JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia perlu ditetapkan peringkat jabatan struktural dan jabatan fungsional bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun

2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNSIONAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

P a s a l 1

Di dalam Keputusan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan :

- a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Tenaga Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan ditugaskan di Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Jaksa atau Tata Usaha yang menduduki jabatan fungsional adalah Jaksa atau Tata Usaha yang tidak menduduki jabatan Struktural.
- d. Jaksa atau Tata Usaha yang menduduki jabatan struktural adalah Jaksa atau Tata Usaha yang diangkat dan menduduki jabatan Struktural berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- e. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Keputusan Jaksa Agung ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

P a s a l 2

- (1) Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional Umum.
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.

P a s a l 3

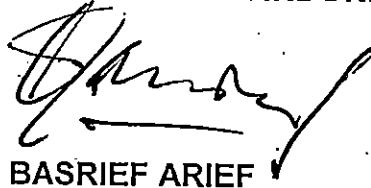
- (1) Kelas Jabatan Struktural adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- (2) Kelas Jabatan Fungsional umum dan Fungsional tercantum adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

P a s a l 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN I

PERATURAN JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Keputusan J a k s a A g u n g R.I.
 Nomor : KEP-150 /A/J.A/07/2011
 Tanggal : 18 Juli 2011

KELAS JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	4
1	Wakil Jaksa Agung RI	18
2	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang PIDUM Jaksa Agung Muda Bidang PIDSUS Jaksa Agung Muda Bidang DATUN	17
3	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan	16
4	Staf Ahli	15
5	Sekretaris JAM PIDUM Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Bidang PIDUM Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum pada Bidang PIDUM Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya pada Bidang PIDUM Direktur Penyidikan pada Bidang PIDSUS Direktur Penuntutan pada Bidang PIDSUS Kepala Pusat Penerangan Hukum Sekretaris JAM Intelijen Sekretaris JAM PIDSUS Sekretaris JAM DATUN Sekretaris JAM Pembinaan Direktur I pada Bidang Intelijen Direktur II pada Bidang Intelijen	14

1	2	4
	Direktur III pada Bidang Intelijen Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang PIDSUS Sekretaris JAM Pengawasan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Kepala Kejaksaan Tinggi Direktur Perdata pada Bidang DATUN Direktur Tata Usaha Negara pada Bidang DATUN Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Bidang DATUN	
6	Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Kepegawaian Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Inspektur I pada Bidang Pengawasan Inspektur II pada Bidang Pengawasan Inspektur III pada Bidang Pengawasan Inspektur IV pada Bidang Pengawasan Inspektur V pada Bidang Pengawasan Kepala Biro Keuangan Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Pusat Diklat Teknis Fungsional Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi	13
7	Koordinator Bidang PIDUM Kepala Biro Umum Asisten Umum Jaksa Agung Asisten Khusus Jaksa Agung Kepala Biro Perlengkapan	12

1	2	4
	Koordinator Bidang Intelijen Koordinator Bidang PIDSUS Koordinator Bidang DATUN	
8	Kabag Penyusunan Rencana dan Program Kerja pada Biro Perencanaan Kabag Organisasi dan Tatalaksana pada Biro Perencanaan Kabag Pendapatan Negara dan Barang Rampasan pada Biro Keuangan Kabag Rancangan dan Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum Atase Kejaksaan di Luar Negeri Kasubdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara Kasubdirektorat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kasubdirektorat TP Korupsi (Direktur Penyidikan) Kasubdirektorat Pelanggaran HAM Berat (Direktur Penyidikan) Kasubdirektorat T.P Khusus Lainnya (Direktur Penyidikan) Kasubdirektorat TP Korupsi (Direktur Penuntutan) Kasubdirektorat Pelanggaran HAM Berat (Direktur Penuntutan) Kasubdirektorat T.P Khusus Lainnya(Direktur Penuntutan) Kasubdirektorat TP Korupsi (Direktur Eksekusi & Eksaminasi) Kasubdirektorat Pelanggaran Ham Berat (Direktur Eksekusi & Eksaminasi) Kasubdirektorat T.P Khusus Lainnya (Direktur Eksekusi & Eksaminasi) Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Dit PPH) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum (Dit PPH) Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Dit Perdata) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum (Dit Perdata) Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum (Dit TUN) Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum (Dit TUN) Asisten Intelijen (Kejati)	11

1	2	4
	Asisten Tindak Pidana Umum (Kejati) Asisten Tindak Pidana Khusus (Kejati) Kepala Kejaksaan Negeri Kabag Pengembangan Pegawai (Biro Kepegawaian) Kabag Kerja Sama Hukum Luar Negeri (Biro Hukum) Kasubdirektorat Penuntutan pada Dir. Tinda Pidana terhadap Keamanan Negara & Ketertiban Umum Kasubdirektorat Penuntutan pada Dir. Tindak Pidana Umum Lainnya Kasubdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Dir. Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Kasubdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Dir. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara & Ketertiban Umum Kasubdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Dir. Tindak Pidana Umum Lainnya Kasubdirektorat Koordinasi PPNS dan Kelembagaan pada Dir. Tindak Pidana Umum Lainnya Kasubdirektorat Pra Penuntutan pada Dir. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara & Ketertiban Umum KaSubdirektorat Pra Penuntutan pada Dir. Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Kasubdirektorat Penuntutan pada Dir. Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Kasubdirektorat Pra Penuntutan pada Dir. Tindak Pidana Umum Lainnya Kasubdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Kasubdirektorat Cegah Tangkal dan Orang Asing Kepala Subdirektorat Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen Kepala Subdirektorat Sumber Daya Teknologi Intelijen Inspektur Muda Pegasum & Kepbang (Inspektur I) Inspektur Muda Pidum & Datun (Inspektur I) Inspektur Muda Intel & Pidsus (Inspektur I)	

1	2	4
	Inspektur Muda Pegasum & Kepbang (Inspektur V) Inspektur Muda Pidum & Datun (Inspektur V) Inspektur Muda Intel & Pidsus (Inspektur V) Inspektur Muda Pegasum & Kepbang (Inspektur II) Inspektur Muda Pidum & Datun (Inspektur II) Inspektur Muda Intel & Pidsus (Inspektur II) Inspektur Muda Pegasum & Kepbang (Inspektur III) Inspektur Muda Pidum & Datun (Inspektur III) Inspektur Muda Intel & Pidsus (Inspektur III) Inspektur Muda Pegasum & Kepbang (Inspektur IV) Inspektur Muda Pidum & Datun (Inspektur IV) Inspektur Muda Intel & Pidsus (Inspektur IV) Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kabid Hubungan Media Massa Kabid Hubungan antar Lembaga/Pemerintah/Non Pemerintah	
9	Kabag Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan (Biro Keuangan) Kabag Sunproglap dan Panil (Pembinaan) Kabag Pemantauan dan Evaluasi (Biro Perencanaan) Kabag Rumah Tangga (Biro Umum) Kabag Kepangkatan (Biro Kepegawaian) Kabag Sunproglap dan Panil (Intelijen) Kasubdirektorat Pelayanan Publik dan Sektor Lainnya Kepala Subdirektorat Politik dan Sosial Budaya Kepala Subdirektorat Pemantauan Kabag Sunproglap dan Panil (Pidum) Kabag Sunproglap dan Panil (PIDSUS) Kabag Sunproglap dan Panil (DATUN) Kabag Sunproglap dan Panil (Pengawasan) Kabag Sunproglap dan Panil (Badan Pendidikan dan Pelatihan) Kabid Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal (Daskrimti) Kabid Penerapan dan Pengembangan Teknologi (Daskrimti) Kabid Penelitian (Litbang)	10

1	2	4
	Kabid Pengkajian dan Pengembangan (Litbang) Asisten Pembinaan (Kejati) Asisten Pengawasan (Kejati) Kabag Pengelolaan Data (Biro Perencanaan) Kabag Umum (Biro Kepegawaian) Kabag Akuntansi dan Pelaporan (Biro Keuangan) Kabag Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi (Biro Perlengkapan) Kasubdirektorat Kinerja Tindak Pidana Umum Kabid Program (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kabid Penyelenggara (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kabid Program (Pusdiklat Teknis Fungsional) Kabid Penyelenggara (Pusdiklat Teknis Fungsional)	
10	Asisten Perdata & Tata Usaha Negara (Kejati) Kabag Keamanan Dalam (Biro Umum) Kabag Tata Usaha (Pembinaan) Kabag Tata Usaha (Sekretariat Badan Diklat) Kabag TU Umum dan Pimpinan (Biro Umum) Kabag Bina Kesejahteraan (Biro Umum) Kabag Pemberhentian dan Pensiun (Biro Kepegawaian) Kabag Pengadaan (Biro Perlengkapan) Kabag Penilaian dan Penghapusan (Biro Perlengkapan) Kabag Perpustakaan dan Dokumentasi (Biro Hukum) Kabag Tata Usaha (Intelijen) Kabag Tata Usaha (Pidum) Kabag Tata Usaha (Pidsus) Kabag Tata Usaha (Datun) Kabag Tata Usaha (Pengawasan) Kabag Tata Usaha (Penkum) Kabag Tata Usaha (Litbang) Kabag Tata Usaha (Pusdaskrimti)	9

1	2	4
	Koordinator di Kejaksaan Tinggi Kabag Tata Usaha (Kejati) <u>Kepala Sekretariat Staf Ahli</u>	
11	Kepala Seksi Intelijen (Kejari) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejari) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kejari) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kasubbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I (Biro Perencanaan) Kasubbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II (Biro Perencanaan) Kasubbagian Kelembagaan (Biro Perencanaan) Kasubbagian Tatalaksana (Biro Perencanaan) Kasubbagian Pendapatan Negara (Biro Keuangan) Kasubbagian Barang Rampasan (Biro Keuangan) Kasubbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum) Kasubbagian Pertimbangan Hukum (Biro Hukum) Kasubbagian Kerjasama Luar Negeri (Biro Hukum) Kasubbagian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (Biro Hukum) Kasubbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional (Biro Hukum) Pemeriksa Pegasum (inspektur I) Pemeriksa Kepbang (inspektur I) Pemeriksa Pidum (inspektur I) Pemeriksa Datun (inspektur I) Pemeriksa Intel (inspektur I) Pemeriksa Pidsus (inspektur I) Pemeriksa Pegasum (inspektur II) Pemeriksa Kepbang (inspektur II) Pemeriksa Pidum (inspektur II) Pemeriksa Datun (inspektur II) Pemeriksa Intel (inspektur II)	8

1	2	4
	Pemeriksa Pidsus (inspektur II) Pemeriksa Pegasum (inspektur III) Pemeriksa Kepbang (inspektur III) Pemeriksa Pidum (inspektur III) Pemeriksa Datun (inspektur III) Pemeriksa Intel (inspektur III) Pemeriksa Pidsus (inspektur III) Pemeriksa Pegasum (inspektur IV) Pemeriksa Kepbang (inspektur IV) Pemeriksa Pidum (inspektur IV) Pemeriksa Datun (inspektur IV) Pemeriksa Intel (inspektur IV) Pemeriksa Pidsus (inspektur IV) Pemeriksa Pegasum (inspektur V) Pemeriksa Kepbang (inspektur V) Pemeriksa Pidum (inspektur V) Pemeriksa Datun (inspektur V) Pemeriksa Intel (inspektur V) Pemeriksa Pidsus (inspektur V)	
12	Kasubbagian Pembinaan (Kejari) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejari) Kasubbagian Kepangkatan I (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Kepangkatan II (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Kepangkatan III (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Angka Kredit (Biro Kepegawaian) Kepala Seksi I (Kejati) Kepala Seksi II (Kejati) Kepala Seksi III (Kejati) Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kejati) Kepala Seksi TP Terhadap Orang dan Harta Benda (Kejati)	7

1	2	4
	Kepala Seksi TP Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kejati) Kepala Seksi TP Umum Lainnya (Kejati) Kepala Seksi Penyidikan (Kejati) Kepala Seksi Penuntutan (Kejati) Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi (Kejati) Kepala Seksi Perdata (Kejati) Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kejati) Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak (Kejati) Kasubbagian Tata Usaha (Biro Umum) Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Badan Diklat) Kasubbagian Sunproglap (Pembinaan) Kasubbagian Pengelolaan Data I (Biro Cana) Kasubbagian Pengelolaan Data II (Biro Cana) Kasubbagian Pemantauan dan Evaluasi I (Biro Cana) Kasubbagian Pemantauan dan Evaluasi II (Biro Cana) Kasubbagian Tata Usaha Pimpinan I (Biro Umum) Kasubbagian Tata Usaha Pimpinan II (Biro Umum) Kasubbagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Biro Umum) Kasubbagian Sarana (Biro Umum) Kasubbagian data kepegawaian (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Peraturan Kepegawaian (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Pengadaan Pegawaian (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Jenjang Karier (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Anggaran (Biro Keuangan) Kasubbagian Perbendaharaan (Biro Keuangan) Kasubbagian Pembelian (Biro Perlengkapan) Kasubbagian Kerjasama antar Instansi Pemerintah (Biro Hukum) Kasubbagian Penyusunan Program dan Laporan (Intelijen)	

1	2	4
	Kasubbagian Penyusunan Program dan Laporan (DATUN) Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Intelijen) Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (DATUN) Kasubbagian Sunproglap (PIDUM) Kasubbagian Sunproglap (PIDSUS) Kasubbagian Sunproglap (Pengawasan) Kasubbagian Pengelolaan Laporan Masyarakat (Pengawasan) Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Pengawasan) Kasubbagian Sunproglap (Pusdaskrimti) Kasubbagian Umum (Pusdaskrimti) Kasubbagian Keuangan (Pusdaskrimti) Kasubbidang Pengelolaan Basis Data (Pusdaskrimti) Kasubbidang Analisis Data dan Statistik Kriminal (Pusdaskrimti) Kasubbidang Perangkat Lunak (Pusdaskrimti) Kasubbidang Perangkat Keras dan Jaringan (Pusdaskrimti) Kasubbidang Penyusunan program dan penelitian (LITBANG) Kasubbidang Pelaksanaan Penelitian (LITBANG) Kasubbidang Pemantauan dan Penilaian Penelitian (LITBANG) Kasubbidang Penyusunan Program Pengkajian dan Pengembangan (LITBANG) Kasubbidang Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan (LITBANG) Kasubbidang PANIL Pengkajian Kasubbagian Penyusunan Program & Laporan (Badan Diklat) Kasubbagian Keuangan (Badan Diklat) Kasubbagian Perlengkapan Perpustakaan dan Dokumentasi (Badan Diklat) Kasubbidang Publikasi dan Pengelolaan Website (Penkum) Kasubbidang Dokumentasi (Penkum) Kasubbidang Penyiapan materi Penerangan/ Penyuluhan Hukum Kasubbidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi	

1	2	4
	Kasubbidang Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Kasubbidang Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah Kasubbag Penyusunan Program dan Laporan (Penkum) Kasubbagian Keuangan (Penkum) Kasubbagian Kepegawaian (Kejati) Kasubbagian Keuangan (Kejati) Kasubbagian Verifikasi (Biro Keuangan) Kasubbagian Pengolahan Data (Biro Keuangan) Kasubbagian Pelaporan (Biro Keuangan) Kasubbagian Inventaris (Biro perlengkapan) Kasubbid Perencanaan (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kasubbid Evaluasi (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kasubbid Akademis (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kasubbid Pengajaran (Pusdiklat Manajemen & kepemimpinan) Kasubbid Perencanaan (Pusdiklat Teknis Fungsional) Kasubbid Evaluasi (Pusdiklat Teknis Fungsional) Kasubbid Akademis (Pusdiklat Teknis Fungsional) Kasubbid Pengajaran (Pusdiklat Teknis Fungsional) Kasubbag Keuangan (Pembinaan) Kasubbag Keuangan (Intelijen) Kasubbag Keuangan (Pidum) Kasubbag Keuangan (Pidsus) Kasubbag Keuangan (Datun) Kasubbag Keuangan (Pengawasan) Kasubbag Keuangan (Litbang) Kasubbag Dokumentasi dan Perpustakaan (Litbang)	
13	Kasubbagian Umum (Intelijen) Kasubbag Umum (Litbang)	6

1	2	4
	Kasubbag Umum (Daskrimti)	
	Kasubbagian Umum (Kejati)	
	Kepala Urusan Kepegawaian	
	Kepala Urusan Keuangan	
	Kepala Urusan Perlengkapan	
	Kepala Urusan Tata Usaha, Daskrimti dan Perpustakaan	
	Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Sesjambin)	
	Kasubbagian Tata Persuratan dan Kearsipan (Sesjambin)	
	Kasubbagian Umum (Sesjambin)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Biro Perencanaan)	
	Kasubbagian Tata Persuratan (Biro Umum)	
	Kasubbagian Produksi dan Distribusi (Biro Umum)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Rumah Tangga)	
	Kasubbagian Angkutan (Biro Umum)	
	Kasubbagian Keamanan (Biro Umum)	
	Kasubbagian Ketertiban (Biro Umum)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Biro Kepegawaian)	
	Kasubbagian Kekayaan dan Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Biro Keuangan)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Biro Perlengkapan)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Biro Hukum)	
	Kasubbagian Tata Persuratan dan Kearsipan (Intelijen)	
	Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidum)	
	Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan (Pidum)	
	Subbagian Umum (Pidum)	
	<u>Kasubbagian pada Sekretariat Staf Ahli</u>	

1	2	4
	Subbagian Tata Usaha (Dit. Tindak Pidana terhadap Orang dan harta Benda)	
	Kasubbag Tata Usaha Tindak Pidana Umum Lainnya	
	Kasubbag TU (Dir. Keamanan Negara dan Ketertiban Umum PIDUM)	
	Kasubbag Tata Usaha (Dir. Penyidikan PIDSUS)	
	Kasubbag Tata Usaha (Dit. Penuntutan)	
	Kasubbag Tata Usaha (Dit. Eksekusi dan Eksaminasi)	
	Kasubbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidsus)	
	Kasubbagian Tata Persuratan dan Kearsipan (Pidsus)	
	Kasubbagian Umum (Pidsus)	
	Kasubbagian Tata Persuratan dan Kearsipan (Datun)	
	Kasubbagian Umum (Datun)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Dir. Petdata)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Dir. TUN)	
	Kasubbagian Tata Usaha (Dir. PPH)	
	Kasubbagian Persuratan (Pengawasan)	
	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat I	
	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat II	
	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat III	
	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat IV	
	Kasubbag Tata Usaha Inspektorat V	
	Kasubbagian Umum dan Kepegawaian (Badan Diklat)	
	Kasubbagian Umum (Pengawasan)	
	Kasubbagian Persuratan (Kejati)	
	Kasubbagian Protokol dan Keamanan Dalam (Kejati)	
	Kasubbagian Daskrimti dan Perpustakaan	
	Pemeriksa I	
	Pemeriksa II	
	Pemeriksa III	
	Pemeriksa IV	

1	2	4
	Pemeriksa V Pemeriksa (Kejari) Kasubbagian Rohani (Biro Umum) Kasubbagian Kesejahteraan dan Sosial Pegawai (Biro Umum) Kasubbagian Pemberhentian dan Pensiun I (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Pemberhentian dan Pensiun II (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Pemberhentian dan Pensiun III (Biro Kepegawaian) Kasubbagian Perjalanan (Biro Keuangan) Kasubbagian Analisa Kebutuhan (Biro perlengkapan) Kasubbagian Pelaporan Barang Milik Negara (Biro Perlengkapan) Kasubbagian Penyimpanan dan Distribusi (Biro perlengkapan) Kasubbagian Penilaian (Biro Perlengkapan) Kasubbagian Penghapusan (Biro Perlengkapan) Kasubbagian Perpustakaan(Biro Hukum) Kasubbagian Dokumentasi Hukum (Biro Hukum) Kasubbagian TU (Dir I) Kasubbagian TU (Dir II) Kasubbag TU (Dir III)	
14	Kepala Urusan Mutasi Pegawai Kepala Urusan Pengembangan Pegawai Kepala Urusan Kesejahteraan Kepala Urusan Anggaran Perjalanan dan Perbendaharaan Kepala Urusan Akuntansi dan Pelaporan Kepala Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan Kepala Urusan Rumah Tangga Kepala Urusan Perlengkapan Kepala Urusan Kearsipan Kepala Urusan Daskrimti dan Kepustakaan Kepala Urusan Dokumentasi Hukum Kepala Urusan Tata Persuratan (Kejati) Kepala Urusan Distribusi (Kejati)	5

1	2	4
	Kepala Urusan Laporan (Kejati) Kepala Urusan Protokol (Kejati) Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kejati) Kepala Urusan Pembinaan (Cabjari) Kepala Urusan Tata Usaha Teknis	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN II

PERATURAN JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

I. KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM.

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	4
1	Operator Simkari	4
	Pengelola SAI	4
	Operator SAKPA	4
	Operator Monitoring Center	4
	Operator AC	4
	Operator Komputer	4
	Operator Mesin	4
	Pengelola Barang Milik Negara	4
	Tehnisi Jaringan	4
	Penganalisis Jabatan	4
	Penganalisis Kesejahteraan Pegawai	4
	Penganalisis Organisasi	4
	Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai	4
	Penganalisis Penggajian Pegawai	4
	Penganalisis Sistem dan Aplikasi	4
	Bendaharawan Penerima	4
	Bendaharawan Pengeluaran	4
	Bendaharawan Gaji	4
	Ajudan Pimpinan	4
	Pengawal Khusus	4
	Analisis Monitoring Center	4
	Pengelola Jaringan Monitoring Center	4
	Pengelola Website	4
	Pengelola Arsip Kepegawaian	4
	Pengelola Data Kepegawaian	4
	Pengelola Keuangan	4
	Pengelola Tata Naskah	4
	Pengelola Bahan Informasi dan Publikasi	4
	Pengevaluasian Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	4
	Pengawal Tahanan	4
2	Penyiap Bahan Analisis Bidang Sosial Politik	3
	Penyiap Bahan Analisis Bidang Ekonomi	3

1	2	4
	Penyiap Bahan Analisis Bidang Keuangan	3
	Penyiap Bahan Analisis Bidang Pertahanan Keamanan	3
	Penyiap Bahan Analisis Bidang Ketertiban Umum	3
	Penyiap Bahan Administrasi Penanganan Perkara	3
	Penyiap Bahan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	3
	Penyiap Bahan Intelijen	3
	Penyiap Barang Bukti	3
	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	3
	Penyusun Laporan Akuntabilitas	3
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	3
	Penyusun Rencana Kerjasama	3
	Pengemudi	3
	Keamanan Dalam	3
	Verifikator	3
	Juru Bayar	3
	Pembuat Daftar Gaji	3
	Pembuat Laporan	3
	Pemelihara Kantor	3
	Pendistribusi Barang Inventaris	3
	Pengadministrasi Barang Milik Negara	3
	Pengadministrasi Gaji	3
	Pengadministrasi Pajak	3
	Penyaji Bahan Pemeriksaan	3
	Penyaji Informasi Kepegawaian	3
	Penyiap Bahan Pemeriksaan	3
	Petugas Dokumentasi	3
	Petugas Penggandaan	3
	Sekretaris	3
3	Caraka	2

II. KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Nama Jabatan	Klasifikasi Jabatan
1	2	4
(1.)	Pranata Hubungan Masyarakat Pemula	3
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	3
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	4
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	4

1	2	4
	Pranata Hubungan Masyarakat pertama	5
	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	6
	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	8
(2)	Peneliti Pertama	6
	Peneliti Muda	8
	Peneliti Madya	10
	Peneliti Utama	12
3.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula	3
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana	4
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	4
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	5
4.	Perekayasa Pertama	7
	Perekayasa Muda	9
	Perekayasa Madya	11
	Perekayasa Utama	13
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	4
	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	5
	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	6
	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	6
	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	7
	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	9
(6.)	Pranata Komputer Pemula	3
	Pranata Komputer Pelaksana	4
	Pranata Komputer Pelaksana lanjutan	4
	Pranata Komputer Penyelia	5
	Pranata Komputer Pertama	6
	Pranata Komputer Muda	7
	Pranata Komputer Madya	9
	Pranata Komputer Utama	11
(7.)	Statistisi Pelaksana	4
	Statistisi Pelaksana Lanjutan	4
	Statistisi Penyelia	5
	Statistisi Pertama	5
	Statistisi Muda	6

1	2	4
	Statistisi Madya	8
8	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	6
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	8
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	10
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	12
9	Perencana Pertama ?	7
	Perencana Muda	9
	Perencana Madya	11
	Perencana Utama	13
10	Analisis Kepegawaian Pelaksana	4
	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	4
	Analisis Kepegawaian Penyelia	5
	Analisis Kepegawaian Pertama	6
	Analisis Kepegawaian Muda	7
	Analisis Kepegawaian Madya	9
11	Arsiparis Pelaksana	4
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	4
	Arsiparis Penyelia	5
	Arsiparis Pertama	5
	Arsiparis Muda	6
	Arsiparis Madya	8
	Arsiparis Utama	10
12	Pustakawan Pelaksana	4
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	4
	Pustakawan Penyelia	5
	Pustakawan Pertama	5
	Pustakawan Muda	6
	Pustakawan Madya	8
	Pustakawan Utama	10
13	Dokter Pertama	7
	Dokter Muda	9
	Dokter Madya	11
	Dokter Utama	13

1	2	4
(14)	Dokter Gigi Pertama	7
	Dokter Gigi Muda	9
	Dokter Gigi Madya	11
	Dokter Gigi Utama	13
(15)	Asisten Apoteker Pemula	3
	Asisten Apoteker Pelaksana	4
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	4
	Asisten Apoteker Penyelia	5
(16)	Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	4
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	4
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	5
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	6
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	6
	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	7
	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	8
17	Instruktur Pelaksana	4
	Instruktur Pelaksana Lanjutan	4
	Instruktur Penyelia	5
	Instruktur Pertama	5
	Instruktur Muda	6
	Instruktur Madya	8
(18)	Widyaiswara Pertama	6
	Widyaiswara Muda	8
	Widyaiswara Madya	10
	Widyaiswara Utama	12
19	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana	4
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana Lanjutan	4
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia	5
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	5
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	6
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya	8
(20)	Auditor Pelaksana	4
	Auditor Pelaksana Lanjutan	5

1	2	4
	Auditor Penyelia	6
	Auditor Pertama	7
	Auditor Muda	9
	Auditor Madya	11
	Auditor Utama	13
21	Penguji Mutu Barang Pelaksana	4
	Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan	4
	Penguji Mutu Barang Penyelia	5
	Penguji Mutu Barang Pertama	5
	Penguji Mutu Barang Muda	6
	Penguji Mutu Barang Madya	8
22	Penerjemah Pertama	5
	Penerjemah Muda	7
	Penerjemah Madya	9
	Penerjemah Utama	12
23	Sandiman Pelaksana	4
	Sandiman Pelaksana Lanjutan	5
	Sandiman Penyelia	6
	Sandiman Pertama	7
	Sandiman Muda	9
	Sandiman Madya	10
24	Ajun Jaksa Madya	5
	Ajun Jaksa	6
	Jaksa Pratama	7
	Jaksa Muda	8
	Jaksa Madya	9
	Jaksa Utama Pratama	10
	Jaksa Utama Muda	11
	Jaksa Utama Madya	12
	Jaksa Utama	13
25	Agan Pelaksana	4
	Agan Pelaksana Lanjutan	5
	Agan Penyelia	6
	Agan Pertama	7
	Agan Muda	9
	Agan Madya	10

1	2	4
26	Pamong Belajar Pelaksana	4
	Pamong Belajar Pelaksana Lanjutan	4
	Pamong Belajar Penyelia	5
	Pamong Belajar Pertama	5
	Pamong Belajar Muda	6
	Pamong Belajar Madya	8
27	Badan Pelaksana	4
	Badan Pelaksana Lanjutan	4
	Badan Pelaksana Penyelia	5
28 ✓	Perawat Pelaksana Pemula	3
	Perawat Pelaksana	4
	Perawat Pelaksana Lanjutan	4
	Perawat Penyelia	5
	Perawat Pertama	5
	Perawat Muda	6
	Perawat Madya	8
29 ✓	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	3
	Perawat Gigi Pelaksana	4
	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	4
	Perawat Gigi Pelaksana Penyelia	5

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF ✓